

EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BULELENG

Dewa Bagus Sanjaya¹, Luh Sri Parmiti²

¹Universitas Pendidikan Ganesha

²Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng, (2) factor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng, (3) upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari PKH di Kabupaten Buleleng, (4) menganalisis gambaran psikologis penerima PKH di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Buleleng populasi penelitian ini adalah keluarga yang menerima PKH yang berjumlah 25000 orang sedangkan sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 900 orang penerima PKH yang tersebar secara proporsional di sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner, wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari aspek input masih terdapat 53,3% penerima PKH yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima PKH hal ini dikarenakan banyak dari responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah (2) dari aspek proses pelaksanaan PKH ini dianggap sudah berjalan dengan efektif hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik serta mendapat respon yang positif dari para penerima PKH (3) dari aspek output, mayoritas responden 63,3% sudah menjalankan kewajiban sebagai penerima PKH dengan baik sedangkan sebanyak 33,7% masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan (4) dari aspek psikologis, program PKH ini ternyata memberikan dampak psikologis yang cukup positif persepsi masyarakat penerima PKH tergolong baik dalam artian mereka benar-benar menerima program PKH ini sebagai sebuah program yang berkualitas dan berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini.

Kata kunci : efektivitas, program keluarga harapa

Abstract

This research aimed at analyzing: (1) The Implementation of PKH policies in Buleleng Regency, (2) The Factors influence PKH policies in Buleleng Regency, (3) The Efforts made in overcoming problems arising from PKH in Buleleng Regency, (4) The Psychological figures PKH recipients in Buleleng Regency. This research used quantitative descriptive research design. The location of this research was in Buleleng regency. The population of this research was families who receive PKH, amounting to 25.000 people. The sample of this research was determined by purposive sampling with a total of 900 PKH recipients who were spread proportionally in nine sub-districts in Buleleng district. The research data were collected using questionnaires, interviews, and observation. The result showed that : (1) from the input aspect, there are still 53,3% of PKH recipients who did not meet the requirements to become PKH recipients. This is because many of the respondents did not meet the poverty criteria set by the government. (2) from the aspect of the process, the implementation of PKH is considered to have been running effectively. This shows that the mentoring process carried out by the local government has been running well and receiving positive response from PKH recipients. (3) from the output aspect, the majority of respondents (63.3%) had fulfilled their obligations as PKH recipients well, while 33.7% had not shown satisfactory results. The perceptions of the PKH recipients are good which are they really accept the PKH program as a quality program and have the potential to improve their current living conditions.

Keyword : *effectiveness, family hope program*

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kabupaten di Bali memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 sebanyak 3.755 jiwa (5,79%), dan tahun 2017 sebanyak 3.748 jiwa (5,74%), tahun 2018 sebanyak 3.520 (5,365). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Sejahtera (PKH). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program ini cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan dinegara-negara yang menerima program ini terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak agar memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga diperuntukan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang

merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng?
- b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng?
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari PKH di Kabupaten Buleleng?
- d) Bagaimana gambaran psikologis penerima PKH di Kabupaten Buleleng?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng.
- b) Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng.
- c) Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari PKH di Kabupaten Buleleng.
- d) Menganalisis gambaran psikologis penerima PKH di Kabupaten Buleleng.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif yang penekanannya pada pengukuran, dan upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik, tentang implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah keluarga yang menerima PKH yang berjumlah 25.000 orang. Sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 900 orang penerima PKH yang tersebar secara proporsional di sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan pencatatan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Input

Efektivitas input ditunjukkan dengan melihat apakah para responden memenuhi syarat untuk menjadi penerima PKH. Terdapat dua indikator pada variabel input, yaitu memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria kemiskinan dan memiliki paling tidak salah satu dari tiga komponen PKH (komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial). Responden dikatakan memenuhi syarat menjadi penerima PKH jika dua indikator tersebut terpenuhi, sedangkan responden dikatakan tidak memenuhi syarat menjadi penerima PKH jika tidak memenuhi dua indikator tersebut atau hanya memenuhi satu dari dua indikator saja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari efektivitas input secara keseluruhan, hasil yang tidak efektif masih terlihat cukup besar di setiap kecamatan. Bahkan secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng, presentase responden yang tidak memenuhi syarat (53,3%) lebih tinggi daripada responden yang memenuhi syarat (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel input masih kurang efektif. Jika dilihat dari masing-masing indikator input, yaitu kriteria kemiskinan dan komponen PKH, mayoritas responden memenuhi syarat komponen PKH, artinya mereka memiliki setidaknya satu dari komponen PKH yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada indikator kemiskinan, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara yang memenuhi kriteria kemiskinan dan yang tidak memenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya input disebabkan oleh masih banyaknya responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan namun tetap menjadi penerima PKH.

a. Indikator Kemiskinan

Wilayah	Kriteria Kemiskinan		
	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Total
Kecamatan Banjar			
Frekuensi	49	60	109
Persentase	44,95%	55,05%	100%
Kecamatan Buleleng			
Frekuensi	63	32	95
Persentase	66,32%	33,68%	100%
Kecamatan Busungbiu			
Frekuensi	49	35	84
Persentase	58,3%	41,7%	100%
Kecamatan Gerokgak			
Frekuensi	22	108	130
Persentase	16,9%	83,1%	100%
Kecamatan Kubutambahan			
Frekuensi	55	40	95
Persentase	57,9%	42,1%	100%
Kecamatan Sawan			

Wilayah	Kriteria Kemiskinan		
	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Total
Frekuensi	47	42	89
Persentase	52,8%	47,2%	100%
Kecamatan Seririt			
Frekuensi	63	47	110
Persentase	57,3%	42,7%	100%
Kecamatan Sukasada			
Frekuensi	55	42	97
Persentase	56,7%	43,3%	100%
Kecamatan Tejakula			
Frekuensi	51	40	91
Persentase	56%	44%	100%
Kabupaten Buleleng			
Frekuensi	454	446	900
Persentase	50,4%	49,6%	100%

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemiskinan responden di masing-masing kecamatan serta keseluruhan kabupaten Buleleng. Dari tabel tersebut didapatkan informasi yaitu:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 55,05% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 44,96% dari keseluruhan responden.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 33,68% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 66,32% dari keseluruhan responden.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 58,3% dari keseluruhan responden). Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 41,7% dari keseluruhan responden.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 16,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 83,1% dari keseluruhan responden.

- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 57,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 42,1% dari keseluruhan responden.
- 6) Untuk kecamatan Sawan, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 52,8% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 47,2% dari keseluruhan responden.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 57,3% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 42,7% dari keseluruhan responden.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 56,7% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 43,3% dari keseluruhan responden.
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 56% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 44% dari keseluruhan responden.
- 10) Keseluruhan di kabupaten Buleleng, responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 50,4% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang memenuhi kriteria kemiskinan sebesar 49,6% dari keseluruhan responden.

b. Indikator Komponen PKH

Wilayah	Kriteria Kemiskinan		
	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Total
Kecamatan Banjar			
Frekuensi	4	105	109
Persentase	3,7%	96,3%	100%
Kecamatan Buleleng			
Frekuensi	2	93	95
Persentase	2,1%	97,9%	100%
Kecamatan Busungbiu			
Frekuensi	1	83	84
Persentase	1,2%	98,8%	100%
Kecamatan Gerokgak			

Wilayah	Kriteria Kemiskinan		
	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Total
Frekuensi	4	126	130
Persentase	3,1%	96,9%	100%
Kecamatan Kubutambahan			
Frekuensi	1	94	95
Persentase	1,1%	98,9%	100%
Kecamatan Sawan			
Frekuensi	38	51	89
Persentase	42,7%	52,3%	100%
Kecamatan Seririt			
Frekuensi	0	110	110
Persentase	0%	100%	100%
Kecamatan Sukasada			
Frekuensi	0	97	97
Persentase	0%	100%	100%
Kecamatan Tejakula			
Frekuensi	5	86	91
Persentase	5,5%	94,5%	100%
Kabupaten Buleleng			
Frekuensi	55	845	900
Persentase	6,1%	93,9%	100%

Dari tabel di atas didapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 96,3% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 3,7% dari keseluruhan responden.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 97,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 2,1% dari keseluruhan responden.

- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 98,8% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen PKM sebesar 1,2% dari keseluruhan responden.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 96,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 3,1% dari keseluruhan responden.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 98,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 1,1% dari keseluruhan responden.
- 6) Untuk kecamatan Sawan, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 52,3% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 42,7% dari keseluruhan responden.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi komponen KPM.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi komponen KPM.
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 94,5% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 5,5% dari keseluruhan responden.
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, responden yang memenuhi komponen KPM sebesar 93,9% dari keseluruhan responden. Sedangkan responden yang tidak memenuhi komponen KPM sebesar 6,1% dari keseluruhan responden.

Terdapat kemungkinan masyarakat yang sudah terbebas dari kemiskinan tetapi masih tercatat sebagai masyarakat miskin disebabkan karena lemahnya pendataan awal. Dengan menjadi KPM, diharapkan masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan dalam waktu 5 tahun, namun kenyataannya masih banyak yang tercatat sebagai masyarakat miskin walaupun mereka sudah menerima PKH lebih dari 5 tahun. Pendataan yang kurang tepat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kesalahan dalam melakukan observasi dan wawancara di lapangan. Petugas lapangan yang ditugaskan untuk melakukan pendataan memerlukan briefing atau pelatihan yang intensif agar dapat melakukan pendataan dengan baik. Proses pendataan masyarakat yang tergolong miskin hendaknya dilakukan dengan optimal agar program pengentasan kemiskinan benar-benar bisa ditujukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Kedua, lemahnya kejujuran dari masyarakat dalam melaporkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya sehingga menyulitkan pendataan yang baik terhadap kondisi riil masyarakat. Masyarakat mungkin saja berbohong agar mereka tetap mendapatkan keuntungan dari program-program pemerintah yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Efektivitas Proses

Efektivitas proses dilihat dari persepsi penerima PKH terhadap proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas setempat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, proses pendampingan PKH dapat dinilai efektif karena persepsi masyarakat terhadap proses pendampingan di seluruh kecamatan di Buleleng tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di masing-masing kecamatan sudah menunjukkan usaha yang optimal dalam melakukan pendampingan dalam rangka memastikan bahwa PKH ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan optimal. Proses yang baik ini tidak dapat dipungkiri juga didukung oleh sikap kooperatif masyarakat dalam menjalani proses pendampingan yang dilakukan, seperti menghadiri pertemuan yang diselenggarakan, pemberian data-data terkini saat pemantauan, dan lain-lain, Berikut hasil yang diperoleh:

a. Efektivitas Proses Keseluruhan

Wilayah	Nilai Maks.	Nilai Min.	Total	Rata-rata
Kecamatan Banjar	4,00	2,80	401,80	3,69
Kecamatan Buleleng	4,00	1,80	323	3,40
Kecamatan Busungbiu	4,00	2,80	283,4	3,37
Kecamatan Gerokgak	4,00	3,00	442,8	3,41
Kecamatan Kubutambahan	4,00	3,00	343,00	3,61
Kecamatan Sawan	4,00	2,00	295,40	3,32
Kecamatan Seririt	4,00	2,60	401,6	3,65
Kecamatan Sukasada	4,00	3,00	341,80	3,52
Kecamatan Tejakula	4,00	1,00	322,0	3,54
Kabupaten Buleleng	4,00	0,60	3154,40	3,51

Dari hasil diatas, dibuat kategori dengan menggunakan mean ideal (M) dan standar deviasi ideal (SD) dengan rumus sebagai berikut:

Klasifikasi	Interval
Rendah	$x < M - SD$
Sedang	$M - SD \leq x < M + SD$
Tinggi	$x > M + SD$

$$M = \frac{\max + \min}{2}$$

$$SD = \frac{\max - \min}{6}$$

Dari data didapatkan bahwa:

$$M = \frac{4 + 1}{2} = 2,5$$

$$SD = \frac{4 - 1}{6} = 0,5.$$

Sehingga didapatkan rumus kategori sebagai berikut.

Klasifikasi	Interval
Rendah	$x < 2,00$
Sedang	$2,00 \leq x < 3,00$
Tinggi	$x \geq 3,00$

Berdasarkan rumus diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,69, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,40, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,37, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,41, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,61, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.

- 6) Untuk kecamatan Sawan, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,32, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,65, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,52, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,54, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor variabel proses secara keseluruhan sebesar 3,51, sehingga rata-rata skor pada variabel proses berada dalam kategori tinggi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, proses pendampingan PKH dapat dinilai efektif karena persepsi masyarakat terhadap proses pendampingan di seluruh kecamatan di Buleleng tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di masing-masing kecamatan sudah menunjukkan usaha yang optimal dalam melakukan pendampingan dalam rangka memastikan bahwa PKH ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan optimal. Proses yang baik ini tidak dapat dipungkiri juga didukung oleh sikap kooperatif masyarakat dalam menjalani proses pendampingan yang dilakukan, seperti menghadiri pertemuan yang diselenggarakan, pemberian data-data terkini saat pemantauan, dan lain-lain.

3. Efektivitas Output

Efektivitas output dilihat dari pemenuhan kewajiban para peserta PKH berdasarkan komponen PKH (Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial) yang dimiliki. Berdasarkan hasil yang diperoleh, di setiap kecamatan masih terdapat penerima PKH yang tidak menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan yang diterima dari PKH, walaupun persentasenya tidak lebih besar daripada penerima PKH yang menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan dari PKH. Secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng, persentase yang efektif jauh lebih besar daripada yang tidak efektif. Namun demikian, hasil yang agak berbeda terlihat pada Kecamatan Busungbiu dimana jumlah yang tidak efektif (52,4%) lebih besar daripada yang tidak efektif (47,6%).

Efektivitas output dilihat dari pemenuhan kewajiban para peserta PKH berdasarkan komponen PKH (Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial) yang dimiliki. Berikut hasil yang diperoleh:

a. Efektivitas Output Keseluruhan

Wilayah	Kriteria Output		
	Tidak Efektif	Efektif	Total
Kecamatan Banjar			
Frekuensi	35	74	109
Persentase	32,1%	67,9%	100%
Kecamatan Buleleng			
Frekuensi	41	54	95
Persentase	43,2%	56,8%	100%
Kecamatan Busungbiu			
Frekuensi	44	40	84
Persentase	52,4%	47,6%	100%
Kecamatan Gerokgak			
Frekuensi	58	72	130
Persentase	44,6%	55,4%	100%
Kecamatan Kubutambahan			
Frekuensi	33	62	95
Persentase	34,7%	65,3%	100%
Kecamatan Sawan			
Frekuensi	6	83	89
Persentase	6,7%	93,3%	100%
Kecamatan Seririt			
Frekuensi	33	77	110
Persentase	30%	70%	100%
Kecamatan Sukasada			
Frekuensi	30	67	97
Persentase	30,9%	69,1%	100%
Kecamatan Tejakula			
Frekuensi	2	2,2%	91
Persentase	89	97,8%	100%
Kabupaten Buleleng			
Frekuensi	282	618	900
Persentase	31,3%	68,7%	100%

Dari tabel di atas didapatkan informasi bahwa:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, sebesar 32,1% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 67,9% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, sebesar 43,2% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 56,8% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, sebesar 52,4% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 47,6% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).

- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, sebesar 44,6% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 55,4% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, sebesar 34,7% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 65,3% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 6) Untuk kecamatan Sawan, sebesar 6,7% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 93,3% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 7) Untuk kecamatan Seririt, sebesar 30% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 70% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, sebesar 30,9% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 69,1% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, sebesar 2,2% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 97,8% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, sebesar 31,3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai (tidak efektif), sedangkan sebesar 68,7% responden memenuhi kriteria sesuai (efektif).

Berdasarkan hasil yang diperoleh, di setiap kecamatan masih terdapat penerima PKH yang tidak menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan yang diterima dari PKH, walaupun persentasenya tidak lebih besar daripada penerima PKH yang menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan dari PKH. Secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng, presentase yang efektif jauh lebih besar daripada yang tidak efektif. Namun demikian, hasil yang agak berbeda terlihat pada Kecamatan Busungbiu dimana jumlah yang tidak efektif (52,4%) lebih besar daripada yang tidak efektif (47,6%).

b. Efektivitas Output Berdasarkan Lama Menerima PKH

Lama Menerima PKH		Kriteria Output	
		Tidak Efektif	Efektif
Kecamatan Banjar			
< 2 tahun	Frekuensi	0	12
	Persentase	0%	100%
2 – 5 tahun	Frekuensi	31	51
	Persentase	37,8%	62,2%
> 5 tahun	Frekuensi	4	11
	Persentase	26,7%	73,3%
Kecamatan Buleleng			
< 2 tahun	Frekuensi	4	8
	Persentase	33,3%	66,7%
2 – 5 tahun	Frekuensi	20	23

Lama Menerima PKH		Kriteria Output	
		Tidak Efektif	Efektif
	Persentase	46,5%	53,5%
> 5 tahun	Frekuensi	17	23
	Persentase	42,5%	57,5%
Kecamatan Busungbiu			
< 2 tahun	Frekuensi	4	3
	Persentase	57,1%	42,9%
2 – 5 tahun	Frekuensi	34	32
	Persentase	51,5%	48,5%
> 5 tahun	Frekuensi	6	5
	Persentase	54,5%	45,5%
Kecamatan Gerokgak			
< 2 tahun	Frekuensi	5	10
	Persentase	33,3%	66,7%
2 – 5 tahun	Frekuensi	51	58
	Persentase	46,8%	53,2%
> 5 tahun	Frekuensi	2	4
	Persentase	33,3%	66,7%
Kecamatan Kubutambahan			
< 2 tahun	Frekuensi	0	4
	Persentase	0%	100%
2 – 5 tahun	Frekuensi	28	53
	Persentase	34,6%	65,4%
> 5 tahun	Frekuensi	5	5
	Persentase	50%	50%
Kecamatan Sawan			
< 2 tahun	Frekuensi	0	6
	Persentase	0%	100%
2 – 5 tahun	Frekuensi	6	75
	Persentase	7,4%	92,6%
> 5 tahun	Frekuensi	0	2
	Persentase	0%	100%
Kecamatan Seririt			
< 2 tahun	Frekuensi	0	1
	Persentase	0%	100%
2 – 5 tahun	Frekuensi	30	63
	Persentase	32,3%	67,7%
> 5 tahun	Frekuensi	3	13
	Persentase	18,8%	81,2%
Kecamatan Sukasada			
< 2 tahun	Frekuensi	4	5
	Persentase	44,4%	55,6%
2 – 5 tahun	Frekuensi	18	39
	Persentase	31,6%	68,4%

Lama Menerima PKH		Kriteria Output	
		Tidak Efektif	Efektif
> 5 tahun	Frekuensi	8	23
	Persentase	25,8%	74,2%
Kecamatan Tejakula			
< 2 tahun	Frekuensi	0	11
	Persentase	0%	100%
2 – 5 tahun	Frekuensi	2	64
	Persentase	3%	97%
> 5 tahun	Frekuensi	0	14
	Persentase	0%	100%
Kabupaten Buleleng			
< 2 tahun	Frekuensi	17	60
	Persentase	22,1%	77,9%
2 – 5 tahun	Frekuensi	220	458
	Persentase	32,4%	67,6%
> 5 tahun	Frekuensi	45	100
	Persentase	31%	69%

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 37,8% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 62,2% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 26,7% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 73,3% memenuhi kriteria sesuai.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, sebesar 33,3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 66,7% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 46,5% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 53,5% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 42,5% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 57,5% memenuhi kriteria sesuai.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, sebesar 57,1% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 42,9% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 51,5% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 48,5% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 54,5% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 45,5% memenuhi kriteria sesuai.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, sebesar 33,3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 66,7% memenuhi kriteria

- sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 46,8% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 53,2% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 33,3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 66,7% memenuhi kriteria sesuai.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 34,6% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 65,4% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 50% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 50% memenuhi kriteria sesuai.
 - 6) Untuk kecamatan Sawan, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 7,4% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 92,6% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai.
 - 7) Untuk kecamatan Seririt, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 32,3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 67,7% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 18,8% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 81,2% memenuhi kriteria sesuai.
 - 8) Untuk kecamatan Sukasada, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, sebesar 44,4% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 55,6% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 31,6% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 68,4% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 25,8% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 74,2% memenuhi kriteria sesuai.
 - 9) Untuk kecamatan Tejakula, pada kategori lama menerima PKH kurang dari 2 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 3% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 97% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, seluruh responden atau sebesar 100% memenuhi kriteria sesuai.
 - 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, kurang dari 2 tahun, sebesar 22,1% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 77,9% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori 2 – 5 tahun, sebesar 32,4% responden tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 67,6% memenuhi kriteria sesuai. Pada kategori lebih dari 5 tahun, sebesar 31% responden

tidak memenuhi kriteria sesuai, sedangkan sebesar 69% memenuhi kriteria sesuai.

4. Persepsi Terhadap PKH

Persepsi adalah serangkaian proses bawah sadar yang seseorang jalani untuk memahami rangsangan dan sensasi yang dihadapi. Proses persepsi dimulai dengan menerima rangsangan dari lingkungan dan diakhiri dengan interpretasi kita terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang memperhatikan atau memilih satu hal spesifik di lingkungan kita, itu menjadi stimulus yang dihadapi. Organisasi rangsangan terjadi melalui proses saraf; ini dimulai dengan reseptor sensorik kita (sentuhan, rasa, penciuman, penglihatan, dan pendengaran), dan diteruskan ke otak kita, tempat kita mengatur informasi yang kita terima. Setelah kita menerima dan mengatur rangsangan, kita dapat mengartikan rangsangan tersebut, yang berarti kita mengambil informasi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat kita kategorikan (Gibson, 1950; Rookes, 2007) Dalam konteks persepsi terhadap PKH maka yang akan dilihat dibagian ini adalah bagaimana para penerima PKH mengartikan dan memaknakan bantuan sosial PKH ini ke dalam kehidupan mereka. Persepsi atau pemaknaan yang positif terhadap PKH bisa dikatakan sebagai prediktor bahwa seseorang tersebut akan memanfaatkan program ini dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,49. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.

Persepsi atau pemaknaan yang positif terhadap PKH bisa dikatakan sebagai prediktor bahwa seseorang tersebut akan memanfaatkan program ini dengan baik dan begitu juga sebaliknya.

Wilayah	Nilai Maks.	Nilai Min.	Total	Rata-rata
Kecamatan Banjar	4,00	2,89	402,78	3,69
Kecamatan Buleleng	4,00	2,78	317,78	3,35
Kecamatan Busungbiu	4,00	3,00	298,56	3,55
Kecamatan Gerokgak	2,63	4,00	423,25	3,26
Kecamatan Kubutambahan	4,00	2,89	344,11	3,62
Kecamatan Sawan	4,00	2,78	298,56	3,30
Kecamatan Seririt	4,00	3,00	406,67	3,70
Kecamatan Sukasada	4,00	2,89	338,89	3,49
Kecamatan Tejakula	4,00	2,89	316,78	3,48
Kabupaten Buleleng	4,00	2,63	3142,36	3,49

Dari tabel di atas didapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,69. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,35. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,55. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,26. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,62. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 6) Untuk kecamatan Sawan, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,30. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,70. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,49. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,48. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,49. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.

5. Harapan

Harapan didefinisikan sebagai kemampuan yang dirasakan seseorang untuk menuju tujuan yang diinginkan dan memotivasi diri sendiri. Seseorang dengan level harapan yang lebih tinggi terbukti berkorelasi positif dengan hasil yang lebih baik di bidang akademik, kesehatan fisik, penyesuaian psikologis, dan juga orientasi masa depan (Snyder, 2002). Dalam konteks PKH, mereka dengan tingkat harapan yang tinggi terhadap program akan semakin baik dalam merencanakan dan menata kehidupan masa depan mereka, untuk keluar dari garis kemiskinan. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.

Wilayah	Nilai Maks.	Nilai Min.	Total	Rata-rata
Kecamatan Banjar	3,56	1,56	303,67	2,79
Kecamatan Buleleng	3,22	1,89	245,78	2,59
Kecamatan Busungbiu	3,33	2,11	226,37	2,69
Kecamatan Gerokgak	3,20	2,30	351,38	2,70
Kecamatan Kubutambahan	3,33	2,11	254,22	2,68
Kecamatan Sawan	3,22	2,33	239,07	2,69
Kecamatan Seririt	3,22	2,00	290,33	2,64
Kecamatan Sukasada	3,44	2,22	263,00	2,71
Kecamatan Tejakula	3,33	2,11	245,33	2,70
Kabupaten Buleleng	3,56	1,56	2419,15	2,69

Dari tabel di atas didapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,79. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 2) Untuk kecamatan Buleleng, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,59. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,70. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,68. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 6) Untuk kecamatan Sawan, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,64. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,71. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.

- 9) Untuk kecamatan Tejakula, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,70. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.

6. Psychological Well-Being (Kesejahteraan Psikologis)

Kesejahteraan psikologis merupakan sebuah kondisi mental yang sejahtera yang ditandai dengan adanya penerimaan diri, otonomi, hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup dan keinginan untuk terus mengembangkan diri. Kesejahteraan psikologis dalam konteks PKH adalah perubahan keadaan mental penerima PKH setelah menerima bantuan sosial ini. Semakin tinggi kesejahteraan psikologi penerima PKH semakin membuktikan efektifitas program ini dan begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,83 sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.

Wilayah	Nilai Maks.	Nilai Min.	Total	Rata-rata
Kecamatan Banjar	3,17	1,94	308,33	2,83
Kecamatan Buleleng	3,56	2,17	263,28	2,77
Kecamatan Busungbiu	3,28	2,50	243,94	2,90
Kecamatan Gerokgak	3,33	2,39	370,38	2,85
Kecamatan Kubutambahan	3,44	2,22	270,00	2,84
Kecamatan Sawan	3,11	2,11	241,39	2,71
Kecamatan Seririt	3,61	2,44	313,78	2,85
Kecamatan Sukasada	3,28	2,39	277,39	2,86
Kecamatan Tejakula	3,33	2,39	259,78	2,85
Kabupaten Buleleng	3,61	1,94	2548,67	2,83

Dari tabel di atas didapatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Untuk kecamatan Banjar, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,83, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.

- 2) Untuk kecamatan Buleleng, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,77, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 3) Untuk kecamatan Busungbiu, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,90, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 4) Untuk kecamatan Gerokgak, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,85, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 5) Untuk kecamatan Kubutambahan, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,84, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 6) Untuk kecamatan Sawan, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,71, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 7) Untuk kecamatan Seririt, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,85, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 8) Untuk kecamatan Sukasada, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,86, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 9) Untuk kecamatan Tejakula, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,85, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.
- 10) Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,83, sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.

SIMPULAN

Beberapa aspek psikologis yang relevan juga diukur untuk menjelaskan kondisi psikologis para penerima PKH, diantaranya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*), harapan (*hope*), dan persepsi (*perception*). Hasil yang diperoleh diantaranya :

- Dari aspek input, masih terdapat 53,3% penerima PKH yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima PKH. Hal ini dikarenakan banyak dari responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Dari aspek proses, pelaksanaan PKH ini dianggap sudah berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik serta mendapatkan respon yang positif dari para penerima PKH.
- Dari aspek output, mayoritas responden (63,3%) sudah menjalankan kewajiban sebagai penerima PKH dengan baik, sedangkan sebanyak 33,7% masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Terdapat banyak kendala yang dialami oleh responden yang menyebabkan diperolehnya hasil ini, diantaranya kondisi pandemi yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan

koneksi internet untuk pendidikan, tidak adanya *home visit*, serta adanya kewajiban-kewajiban adat yang harus dilakukan.

- Dari aspek psikologis, program PKH ini ternyata memberikan dampak psikologis yang cukup positif. Persepsi masyarakat penerima PKH tergolong baik dalam artian mereka benar-benar menerima program PKH ini sebagai sebuah program yang berkualitas dan berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini. Penerimaan adalah layer pertama seseorang untuk menerima sesuatu. Untuk ke depannya, maka kita hanya perlu untuk memberikan sosialisasi dengan lebih repetitif agar program PKH ini dapat diterima dengan lebih jelas dan tidak terlupakan. Pada aspek harapan, program PKH ini masuk ke dalam kategori sedang. Kategori sedang ini dapat dimaknai bahwa sudah mulai terbentuk harapan dalam diri masyarakat bahwa PKH ini dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Program PKH telah terbukti mampu memberikan stimulus pada masyarakat untuk tidak lagi berada di dalam kemiskinan. Untuk ke depannya, harapan ini perlu ditingkatkan kembali dan apabila memungkinkan untuk mendata harapan setiap orang sehingga mempermudah untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Yang terakhir yaitu pada aspek kesejahteraan psikologis, masuk ke dalam kategori sedang. Ini berarti bahwa program PKH mampu memberikan kesejahteraan psikologis yang cukup bagi para penerimanya. Kesejahteraan psikologis ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sejahtera khususnya dalam aspek psikologis akan menciptakan situasi bermasyarakat yang kondusif, aman dan tentram.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- Pendataan perlu dilakukan dengan lebih optimal
Hasil input menunjukkan bahwa banyak dari responden tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Pendataan yang lebih cermat perlu dilakukan, misalnya dengan memberikan pelatihan melakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang melakukan pendataan, proses pendataan dilakukan secara berkala, serta mendorong usaha dari masyarakat untuk melaporkan data yang sebenar-benarnya saat dilakukan pengumpulan data.
- Kolaborasi lintas sektoral untuk pengentasan kemiskinan
Hasil yang kurang efektif, khususnya pada aspek input dan output menunjukkan bahwa bantuan dari PKH ini mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Terlebih dengan situasi pandemi seperti ini, terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang juga mendesak untuk dipenuhi. Dinas Sosial hendaknya menjalin kolaborasi dengan dinas lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas

Kesehatan. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dikhususkan untuk memberikan bantuan pendidikan untuk memfasilitasi belajar masyarakat secara daring, sedangkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan bisa dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada ibu hamil atau lansia baik berupa layanan di puskesmas *home visit*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2013. *Buku Kerja Pendamping PKH*. Jakarta.
- Kaplan, Robert, S. and Norton, David, P. 2001. *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Nugroho,D, Riant,. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rismana, Daud. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. Volume XI no 2. file:///C:/Users/ASUSX4~1/AppData/Local/Temp/2201-5929-1-PB.pdf. diakses pada 13 Oktober 2020.
- Sarman, Koesbiono Hadi. 2000. *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang”.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Tachjan.(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wibawa, Her Kustriyadi. 2002. *Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Tentang *Program Keluarga Harapan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 15 tahun 2010 Tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*.
- Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Nasional*